



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa Standar Harga Satuan Provinsi Bengkulu telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan dan keadaan saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Standar harga satuan meliputi :

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- c. satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor;
- d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
- e. satuan biaya pemeliharaan;
- f. satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur;
- g. satuan biaya konsumsi rapat dan kegiatan;
- h. satuan biaya jasa wasit dan juri;
- i. satuan biaya sewa;
- j. satuan biaya jasa penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- k. satuan biaya *reward*/penghargaan;
- l. satuan biaya kontribusi asosiasi;
- m. satuan biaya jasa tenaga kesehatan;
- n. satuan biaya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; dan
- o. satuan biaya tugas belajar pendidikan pns.

(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) Ayat, yakni Ayat (4) dan Ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
 - (4) Standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 1 Agustus 2025

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 1 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.

HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



ROSEFFENDI, S.H., M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19721012 200212 1 004



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan standar harga satuan regional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Keputusan Gubernur ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor;
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
5. Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur
6. Satuan biaya jasa wasit dan juri;
7. Satuan biaya sewa;
8. Satuan biaya jasa penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
9. Satuan biaya *reward*/penghargaan;
10. Satuan biaya kontribusi asosiasi;
11. Satuan biaya jasa tenaga kesehatan;
12. Satuan biaya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; dan
13. Satuan biaya tugas belajar pendidikan pns.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD);
- 1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.

- 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
- 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
- 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. ketentuan honorarium Pejabat Penatusahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatusahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
- 1) honorarium Pejabat Penatusahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatusahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan tugas kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatusahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatusahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatusahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatusahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatusahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatusahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangka oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa Dan Panitia

1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan, memberi paparan umum dan/atau materi khusus dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Gubernur/wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, pimpinan anggota DPRD, dan/atau Kepala OPD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah/instansi vertikal dan/ atau masyarakat.

1.4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu

pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Jabatan | Klasifikasi | | |
|----|--|-------------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1 | Pejabat Eselon I dan Eselon II | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Pejabat Eselon III | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan pejabat fungsional | 5 | 6 | 7 |

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Gubernur atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 1. dengan mengikut sertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Gubernur; atau
 2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dapat dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7 Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan

Honorarium penyuluhan dan pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi Bengkulu dengan ketentuan:

- a lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Provinsi Bengkulu;
- b lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ;
- c lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ;
- d lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ; dan
- e lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu.

1.8 Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin Atau Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang baik cetak maupun elektronik. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Gubernur. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *Website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4 Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/ buletin/ majalah/ *website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/ buletin/ majalah/ *website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.8.1, angka 1.8.2 dan angka 1.8.3.

1.10 Honorarium Penyelenggaraan Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun/pembuat naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes *asesmen* pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan

1.12.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Gubernur. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan Biaya Honorarium terinci pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Satuan Biaya Honorarium

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------|--|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | | |
| | 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | 1.040.000 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | OB | 1.250.000 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | OB | 1.450.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------|---|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar | OB | 1.660.000 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OB | 1.970.000 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OB | 2.280.000 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | OB | 2.590.000 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OB | 3.010.000 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OB | 3.420.000 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar | OB | 3.840.000 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OB | 4.250.000 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OB | 4.770.000 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | OB | 5.290.000 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar | OB | 5.810.000 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun | OB | 6.330.000 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun | OB | 7.370.000 |
| | | | |
| | 1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | OB | 1.010.000 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | OB | 1.210.000 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | OB | 1.410.000 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | OB | 1.610.000 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OB | 1.910.000 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OB | 2.210.000 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | OB | 2.520.000 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OB | 2.920.000 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OB | 3.320.000 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar | OB | 3.720.000 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OB | 4.130.000 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OB | 4.630.000 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | OB | 5.130.000 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar | OB | 5.640.000 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun | OB | 6.140.000 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun | OB | 7.140.000 |
| | | | |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----------|--|----------|--------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| | 1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD) | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | OB | 400.000 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | OB | 480.000 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | OB | 570.000 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | OB | 660.000 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OB | 770.000 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OB | 880.000 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | OB | 990.000 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OB | 1.250.000 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OB | 1.520.000 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar | OB | 1.780.000 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OB | 2.040.000 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OB | 2.440.000 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | OB | 2.830.000 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar | OB | 3.230.000 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun | OB | 3.620.000 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun | OB | 4.420.000 |
| | 1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | OB | 340.000 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | OB | 420.000 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | OB | 500.000 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | OB | 570.000 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OB | 670.000 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OB | 770.000 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | OB | 860.000 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OB | 1.090.000 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OB | 1.320.000 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar | OB | 1.550.000 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OB | 1.780.000 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OB | 2.120.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------|---|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | OB | 2.470.000 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar | OB | 2.810.000 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun | OB | 3.160.000 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun | OB | 3.840.000 |
| | 1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | OB | 260.000 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | OB | 310.000 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | OB | 370.000 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | OB | 430.000 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OB | 500.000 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OB | 570.000 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | OB | 640.000 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OB | 810.000 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OB | 980.000 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar | OB | 1.150.000 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OB | 1.330.000 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OB | 1.580.000 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | OB | 1.840.000 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar | OB | 2.090.000 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun | OB | 2.350.000 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun | OB | 2.860.000 |
| 1.2 | HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA | | |
| | 1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa | OB | 680.000 |
| | 1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa | | |
| | 1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi | | |
| | a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta | OP | 850.000 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | OP | 1.020.000 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar | OP | 1.270.000 |
| | d. Nilai pagu dana di atas RpRp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | OP | 1.520.000 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar | OP | 1.780.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------|--|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | OP | 2.120.000 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | OP | 2.450.000 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar | OP | 2.790.000 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar | OP | 3.130.000 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OP | 3.580.000 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OP | 4.030.000 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OP | 4.490.000 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun | OP | 4.940.000 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun | OP | 5.560.000 |
| | | | |
| | 1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang | | |
| | a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta | OP | 760.000 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | OP | 920.000 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar | OP | 1.140.000 |
| | d. Nilai pagu dana di atas RpRp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | OP | 1.370.000 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar | OP | 1.600.000 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | OP | 1.910.000 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | OP | 2.210.000 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar | OP | 2.520.000 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar | OP | 2.820.000 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OP | 3.230.000 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OP | 3.640.000 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OP | 4.040.000 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun | OP | 4.450.000 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun | OP | 5.010.000 |
| | | | |
| | 1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi | | |
| | a. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | OP | 480.000 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta | OP | 600.000 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | OP | 720.000 |
| | d. Nilai pagu dana di atas RpRp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar | OP | 910.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------|--|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | OP | 1.090.000 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar | OP | 1.270.000 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | OP | 1.510.000 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | OP | 1.750.000 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar | OP | 1.990.000 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar | OP | 2.230.000 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OP | 2.560.000 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OP | 2.880.000 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OP | 3.200.000 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun | OP | 3.520.000 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun | OP | 3.960.000 |
| | 1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya | | |
| | a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta | OP | 600.000 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | OP | 720.000 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar | OP | 910.000 |
| | d. Nilai pagu dana di atas RpRp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | OP | 1.090.000 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar | OP | 1.270.000 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | OP | 1.510.000 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | OP | 1.750.000 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar | OP | 1.990.000 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar | OP | 2.230.000 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OP | 2.560.000 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OP | 2.880.000 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OP | 3.200.000 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun | OP | 3.520.000 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun | OP | 3.960.000 |
| 1.3 | HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA | | |
| | 1.3.1. Kepala | OB | 1.000.000 |
| | 1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung | OB | 750.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------|---|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4 | HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA | | |
| | 1.4.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas | | |
| | a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya | OJ | 1.700.000 |
| | b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Gubernur/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | OJ | 1.400.000 |
| | c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan | OJ | 1.200.000 |
| | d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | OJ | 1.000.000 |
| | e. Pejabat Eselon III ke Bawah/ yang disetarakan | OJ | 900.000 |
| | 1.4.2 Honorarium Moderator | OK | 700.000 |
| | 1.4.3 Honorarium Pembawa Acara | OK | 400.000 |
| | 1.4.4 Honorarium Panitia | | |
| | a. Penanggung Jawab | OK | 450.000 |
| | b. Ketua/ Wakil Ketua | OK | 400.000 |
| | c. Sekretaris | OK | 300.000 |
| | d. Anggota | OK | 300.000 |
| 1.5 | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | | |
| | 1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | |
| | yang ditetapkan oleh Gubernur | | |
| | a. Pengarah | OB | 1.500.000 |
| | b. Penanggungjawab | OB | 1.250.000 |
| | c. Ketua | OB | 1.000.000 |
| | d. Wakil Ketua | OB | 850.000 |
| | e. Sekretaris | OB | 750.000 |
| | f. Anggota | OB | 750.000 |
| | 1.5.2 yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah | | |
| | a. Pengarah | OB | 750.000 |
| | b. Penanggungjawab | OB | 700.000 |
| | c. Ketua | OB | 650.000 |
| | d. Wakil Ketua | OB | 600.000 |
| | e. Sekretaris | OB | 500.000 |
| | f. Anggota | OB | 500.000 |
| | 1.5.3 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | |
| | Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah | | |
| | a. Ketua/ Wakil Ketua | OB | 250.000 |
| | b. Anggota | OB | 220.000 |
| 1.6 | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA | | |
| | 1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli | OK | 1.800.000 |
| | 1.6.2 Honorarium Beracara | OK | 1.800.000 |
| 1.7 | HONORARIUM PENYULUHAN | | |
| | 1.7.1 SLTA | OB | 2.100.000 |
| | 1.7.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan | OB | 2.400.000 |
| | 1.7.3 Sarjana (S1) | OB | 2.600.000 |
| | 1.7.4 Master (S2) | OB | 2.800.000 |
| | 1.7.5 Doktor (S3) | OB | 3.000.000 |
| 1.8 | HONORARIUM ROHANIAWAN | OK | 400.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.9 | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE | | |
| | 1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal | | |
| | a. Penanggung Jawab | Oter | 500.000 |
| | b. Redaktur | Oter | 400.000 |
| | c. Penyunting/ Editor | Oter | 300.000 |
| | d. Desain Grafis | Oter | 180.000 |
| | e. Fotografer | Oter | 180.000 |
| | f. Sekretariat | Oter | 150.000 |
| | 1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah | | |
| | a. Penanggung Jawab | Oter | 400.000 |
| | b. Redaktur | Oter | 300.000 |
| | c. Penyunting/ Editor | Oter | 250.000 |
| | d. Desain Grafis | Oter | 180.000 |
| | e. Fotografer | Oter | 180.000 |
| | f. Sekretariat | Oter | 150.000 |
| | 1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website | | |
| | a. Penanggung Jawab | OB | 500.000 |
| | b. Redaktur | OB | 450.000 |
| | c. Editor | OB | 400.000 |
| | d. Web Admin | OB | 350.000 |
| | e. Web Developer | OB | 300.000 |
| | 1.9.4 Honorarium Penulis Artikel | | |
| | a. Penulis Artikel Jurnal | Per Halaman | 200.000 |
| | b. Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ Website | Per Halaman | 100.000 |
| | | | |
| 1.10 | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN | | |
| | 1.10.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar | | |
| | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian | Naskah/ Pelajaran | 150.000 |
| | b. Pengawas Ujian | OH | 240.000 |
| | c. Pemeriksa Hasil Ujian | Siswa/ Mata Ujian | 5.000 |
| | 1.10.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah | | |
| | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian | Naskah/ Pelajaran | 190.000 |
| | b. Pengawas Ujian | OH | 270.000 |
| | c. Pemeriksa Hasil Ujian | Siswa/ Mata Ujian | 7.500 |
| | | | |
| 1.11 | HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI | | |
| | 1.11.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi | Per Butir Soal | 100.000 |
| | 1.11.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi | | |
| | a. Telaah Materi Soal | Per Butir Soal | 45.000 |
| | b. Telaah Bahasa Soal | Per Butir Soal | 20.000 |
| | | | |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------|--|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.12 | HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) | | |
| | 1.12.1 Honorarium Penceramah | OJP | 1.000.000 |
| | 1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara | OJP | 300.000 |
| | 1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara | OJP | 200.000 |
| | 1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat | Per Modul | 5.000.000 |
| | 1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat | | |
| | a. Lama Diklat s.d 5 Hari | | |
| | 1) Penanggung Jawab | OK | 450.000 |
| | 2) Ketua/ Wakil Ketua | OK | 400.000 |
| | 3) Sekretaris | OK | 300.000 |
| | 4) Anggota | OK | 300.000 |
| | b. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari | | |
| | 1) Penanggung Jawab | OK | 675.000 |
| | 2) Ketua/ Wakil Ketua | OK | 600.000 |
| | 3) Sekretaris | OK | 450.000 |
| | 4) Anggota | OK | 450.000 |
| | c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari | | |
| | 1) Penanggung Jawab | OK | 900.000 |
| | 2) Ketua/ Wakil Ketua | OK | 800.000 |
| | 3) Sekretaris | OK | 600.000 |
| | 4) Anggota | OK | 600.000 |
| 1.13 | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH | | |
| | 1.13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| | a. Pembina | OB | 3.500.000 |
| | b. Pengarah | OB | 3.000.000 |
| | c. Ketua | OB | 2.500.000 |
| | d. Wakil Ketua | OB | 2.000.000 |
| | e. Sekretaris | OB | 1.500.000 |
| | f. Anggota | OB | 1.300.000 |
| | 1.13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| | a. Ketua | OB | 1.000.000 |
| | b. Sekretaris | OB | 900.000 |
| | c. Anggota | OB | 600.000 |
| 1.14 | HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH | | |
| | 1.14.1 Pengurus Barang Pengelola | OB | 500.000 |
| | 1.14.2 Pembantu Pengurus Barang Pengelola | OB | 450.000 |
| | 1.14.3 Pengurus Barang Pengguna | OB | 400.000 |
| | 1.14.4 Pembantu Pengurus Barang Pengguna | OB | 350.000 |
| | 1.14.5 Pengurus Barang Pembantu | OB | 300.000 |

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain (non ASN) Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (datasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh :

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.

- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke Kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas :

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya *transport*;
- c. biaya Penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya *transport* diatur dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain (non ASN) dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar Provinsi Bengkulu dan di dalam Provinsi Bengkulu lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 1.2, Tabel 1.3 dan Tabel 1.4

Tabel 1.2
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu

| NO | PROVINSI | SATUAN | LUAR PROVINSI BENGKULU (Rp) | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp) | DIKLAT (Rp) |
|----------|---------------------|----------|--------------------------------------|---|----------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> |
| 1. | ACEH | OH | 360.000 | 140.000 | 110.000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 3. | RIAU | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 5. | JAMBI | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
| 8. | BENGKULU | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
| 9. | LAMPUNG | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | OH | 410.000 | 160.000 | 120.000 |
| 11. | BANTEN | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 12. | JAWA BARAT | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA | OH | 530.000 | 210.000 | 160.000 |
| 14. | JAWA TENGAH | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | OH | 420.000 | 170.000 | 130.000 |
| 16. | JAWA TIMUR | OH | 410.000 | 160.000 | 120.000 |
| 17. | BALI | OH | 480.000 | 190.000 | 140.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 440.000 | 180.000 | 130.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | OH | 360.000 | 140.000 | 110.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 26. | GORONTALO | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 27. | SULAWESI BARAT | OH | 410.000 | 160.000 | 120.000 |
| 28. | SULAWESI SELATAN | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
| 29. | SULAWESI TENGAH | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
| 31. | MALUKU | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
| 32. | MALUKU UTARA | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
| 33. | PAPUA | OH | 580.000 | 230.000 | 170.000 |
| 34. | PAPUA BARAT | OH | 480.000 | 190.000 | 140.000 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA | OH | 480.000 | 190.000 | 140.000 |
| 36. | PAPUA TENGAH | OH | 580.000 | 230.000 | 170.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN | OH | 580.000 | 230.000 | 170.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN | OH | 580.000 | 230.000 | 170.000 |

Tabel 1.3
Uang Transportasi Lokal

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) | KET |
|----------|-------------------------|----------|-----------------|---|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> |
| 1. | Uang Transportasi Lokal | OH | 75.000 | Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 Jam |

Tabel 1.4
Uang Harian Perjalanan Dinas

| NO | KABUPATEN/KOTA | SATUAN | BESARAN (Rp) | KET |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|--|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> |
| 1. | KOTA BENGKULU | OH | 150.000 | Lebih dari 8 Jam |
| 2. | KAB. KAUR | OH | 380.000 | Besaran uang harian juga berlaku untuk pelaksanaan perjalanan dinas di dalam kawasan hutan yang ada di Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Bengkulu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlaku. |
| 3. | KAB. BENGKULU SELATAN | | | |
| 4. | KAB. SELUMA | | | |
| 5. | KAB. BENGKULU TENGAH | | | |
| 6. | KAB. KEPAHANG | | | |
| 7. | KAB. REJANG LEBONG | | | |
| 8. | KAB. LEBONG | | | |
| 9. | KAB. BENGKULU UTARA | | | |
| 10. | KAB. MUKOMUKO | | | |

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips *porter*, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum, Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.5

Tabel 1.5
Uang Representasi Perjalanan Dinas

| NO | URAIAN | SATUAN | LUAR KOTA (Rp) | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp) |
|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------------|---|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> |
| 1 | PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH | OH | 250.000 | 125.000 |
| 2 | PEJABAT ESELON I | OH | 200.000 | 100.000 |
| 3 | PEJABAT ESELON II | OH | 150.000 | 75.000 |

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

1. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar Provinsi Bengkulu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas

luar provinsi Bengkulu. Adapun, satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu terinci pada Tabel 1.6

Tabel 1.6
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu

| NO | PROVINSI | SATUAN | TARIF HOTEL | | | |
|----------|---------------------|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR / PIMPINAN DPRD / PEJABAT ESELON 1 (Rp) | ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp) | PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV (Rp) | PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III, II, I DAN NON ASN (Rp) |
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> |
| 1. | ACEH | OH | 4.420.000 | 3.526.000 | 1.533.000 | 770.000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | OH | 4.960.000 | 2.195.000 | 1.100.000 | 699.000 |
| 3. | RIAU | OH | 3.820.000 | 3.119.000 | 1.650.000 | 852.000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | OH | 5.344.000 | 2.318.000 | 1.297.000 | 792.000 |
| 5. | JAMBI | OH | 5.000.000 | 4.102.000 | 1.225.000 | 580.000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | OH | 5.236.000 | 3.332.000 | 1.353.000 | 701.000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | OH | 5.850.000 | 3.083.000 | 1.955.000 | 861.000 |
| 8. | LAMPUNG | OH | 4.491.000 | 2.488.000 | 1.425.000 | 580.000 |
| 9. | BENGGKULU | OH | 2.140.000 | 1.628.000 | 1.546.000 | 692.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | OH | 3.827.000 | 2.838.000 | 1.957.000 | 649.000 |
| 11. | BANTEN | OH | 5.725.000 | 2.373.000 | 1.204.000 | 724.000 |
| 12. | JAWA BARAT | OH | 5.381.000 | 2.755.000 | 1.201.000 | 686.000 |
| 13. | D.K.I JAKARTA | OH | 8.720.000 | 2.063.000 | 992.000 | 730.000 |
| 14. | JAWA TENGAH | OH | 5.303.000 | 1.850.000 | 1.201.000 | 750.000 |
| 15. | D.I YOGYAKARTA | OH | 5.017.000 | 2.695.000 | 1.384.000 | 845.000 |
| 16. | JAWA TIMUR | OH | 4.449.000 | 2.007.000 | 1.153.000 | 814.000 |
| 17. | BALI | OH | 6.848.000 | 2.433.000 | 1.685.000 | 1.138.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 4.375.000 | 2.648.000 | 1.418.000 | 907.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 3.750.000 | 2.133.000 | 1.355.000 | 688.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | OH | 2.654.000 | 1.923.000 | 1.125.000 | 538.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | OH | 4.901.000 | 3.391.000 | 1.160.000 | 659.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | OH | 4.797.000 | 3.316.000 | 1.500.000 | 697.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | OH | 4.000.000 | 2.188.000 | 1.507.000 | 804.000 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA | OH | 4.000.000 | 2.735.000 | 1.507.000 | 904.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA | OH | 4.919.000 | 2.290.000 | 1.207.000 | 978.000 |
| 26. | GORONTALO | OH | 4.168.000 | 3.107.000 | 1.606.000 | 955.000 |
| 27. | SULAWESI BARAT | OH | 4.076.000 | 3.098.000 | 1.344.000 | 704.000 |
| 28. | SULAWESI SELATAN | OH | 4.820.000 | 1.938.000 | 1.423.000 | 745.000 |
| 29. | SULAWESI TENGAH | OH | 2.309.000 | 2.027.000 | 1.679.000 | 951.000 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA | OH | 3.088.800 | 2.574.000 | 1.297.000 | 786.000 |
| 31. | MALUKU | OH | 3.467.000 | 3.240.000 | 1.059.000 | 667.000 |
| 32. | MALUKU UTARA | OH | 4.611.600 | 3.843.000 | 1.160.000 | 605.000 |
| 33. | PAPUA | OH | 3.859.000 | 3.318.000 | 2.521.000 | 1.038.000 |
| 34. | PAPUA BARAT | OH | 3.872.000 | 3.341.000 | 2.056.000 | 967.000 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA | OH | 3.872.000 | 3.341.000 | 2.056.000 | 967.000 |
| 36. | PAPUA TENGAH | OH | 3.859.000 | 3.318.000 | 2.521.000 | 1.038.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN | OH | 5.673.000 | 4.877.000 | 3.706.000 | 1.526.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN | OH | 5.711.000 | 4.911.000 | 3.731.000 | 1.536.000 |

2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam Provinsi Bengkulu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam provinsi Bengkulu.

Adapun, satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu terinci pada Tabel 1.7

Tabel 1.7
Biaya Penginapan
Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu

| NO | KABUPATEN/ KOTA | SATUAN | TARIF HOTEL | | | |
|-----|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR / PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON 1 (Rp) | ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp) | PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp) | PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II, I DAN NON ASN (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KOTA BENGKULU | OH | 2.140.000 | 1.628.000 | 1.546.000 | 692.000,- |
| 2. | KAB. KAUR | OH | 450.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000,- |
| 3. | KAB. BENGKULU SELATAN | OH | 450.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000,- |
| 4. | KAB. SELUMA | OH | 350.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000,- |
| 5. | KAB. BENGKULU TENGAH | OH | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000,- |
| 6. | KAB. KEPAHANG | OH | 650.000 | 550.000 | 500.000 | 350.000,- |
| 7. | KAB. REJANG LEBONG | OH | 1.500.000 | 850.000 | 550.000 | 450.000,- |
| 8. | KAB. LEBONG | OH | 605.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000,- |
| 9. | KAB. BENGKULU UTARA | OH | 500.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000,- |
| 10. | KAB. MUKOMUKO | OH | 500.000 | 440.000 | 385.000 | 330.000,- |

Catatan:

- Untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Wakil-Wakil Ketua DPRD kepada ajudan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Wakil-Wakil Ketua DPRD dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/ penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/ penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai standar satuan harga, maka ajudan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Wakil-Wakil Ketua DPRD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.
- Khusus untuk Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur mengenai Perjalanan Dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu tarif hotel dapat digunakan oleh pegawai Badan Penghubung dan Pegawai pada UPP dan Cabang Dinas di Kabupaten pada Wilayah Provinsi Bengkulu dengan tetap berpedoman prinsip efektif, efisien serta kepatutan, kewajaran dan akuntabel;

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.8 dan Tabel 1.9

Tabel 1.8

Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Gubernur/ Wakil Gubernur/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I

| <u>NO</u> | <u>URAIAN</u> | <u>SATUAN</u> | <u>HALFDAY (Rp)</u> | <u>FULLDAY (Rp)</u> | <u>FULLBOARD (Rp)</u> | <u>RESIDENCE (Rp)</u> |
|-----------|--|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> |
| 1 | Biaya Kegiatan Rapat Diluar Kantor setingkat Gubernur/ Wakil Gubernur/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I | OP | 383.000 | 538.000 | 1.262.000 | 921.000 |

Tabel 1.9

Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II ke Bawah

| <u>NO</u> | <u>URAIAN</u> | <u>SATUAN</u> | <u>HALFDAY (Rp)</u> | <u>FULLDAY (Rp)</u> | <u>FULLBOARD (Rp)</u> | <u>RESIDENCE (Rp)</u> |
|-----------|---|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> |
| 1 | Biaya Kegiatan Rapat Diluar Kantor setingkat Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II ke bawah | OP | 343.000 | 468.000 | 1.062.000 | 811.000 |

3.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.10.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.10
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan Diluar Kantor

| NO | URAIAN | SATUAN | FULLBOARD DILUAR KOTA (Rp) | FULLBOARD DIDALAM KOTA (Rp) | FULLDAY/ HALFDAY DIDALAM KOTA (Rp) | RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp) |
|----------|--|----------|----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> |
| 1 | Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor | OH | 130.000 | 130.000 | 95.000 | 130.000 |

4. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Satuan biaya yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang melaksanakan tugas diluar jam kerja yang tidak dibebankan melalui Belanja Perjalanan Dinas, Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur terinci pada tabel 1.11 dan tabel 1.12

Tabel 1.11
Uang Lembur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)

| NO | URAIAN | SATUAN | GOLONGAN IV | GOLONGAN III | GOLONGAN II | GOLONGAN I DAN NON ASN |
|----------|-------------|----------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> |
| 1 | Uang Lembur | OJ | 36.000 | 30.000 | 24.000 | 18.000 |

Tabel 1.12
Uang Makan Lembur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)

| NO | URAIAN | SATUAN | GOLONGAN IV | GOLONGAN III | GOLONGAN II DAN I | NON ASN |
|----------|-------------------|----------|----------------|-----------------|----------------------|----------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> |
| 1 | Uang Makan Lembur | OH | 41.000 | 37.000 | 35.000 | 30.000 |

Ketentuan :

1. Pemberian Uang Lembur berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang;
2. Uang Makan Lembur diberikan kepada ASN dan Non ASN setelah bekerja paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali perhari;
3. Ketentuan angka 1 dan 2 diatas tidak termasuk Non ASN yang melakukan perjanjian kerja/ kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

5. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua

melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah, Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 1.13

Tabel 1.13
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
|------------|--|----------|---------------|
| I | KENDARAAN DINAS PEJABAT | | |
| | 1. Pejabat Eselon I | Unit | 878.913.000 |
| | 2. Pejabat Eselon II | Unit | 835.112.000 |
| II | KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) | | |
| | 1. <i>Pick Up</i> | Unit | 313.527.000 |
| | 2. Minibus | Unit | 387.510.000 |
| | 3. <i>Double Gardan</i> | Unit | 576.868.000 |
| III | KENDARAAN OPERASIONAL BUS | | |
| | 1. Roda 4 dan/ atau Bus Kecil | Unit | 498.810.000 |
| | 2. Roda 6 dan/ atau Bus Sedang | Unit | 768.820.000 |
| | 3. Roda 6 dan/ atau Bus Besar | Unit | 1.268.200.000 |
| IV | KENDARAAN OPERASIONAL DAN/ ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) DAN RODA 3 (TIGA) | | |
| | 1. Operasional | Unit | 41.253.000 |
| | 2. Lapangan | Unit | 49.325.000 |

6. SATUAN BIAYA JASA WASIT DAN JURI

Biaya Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan dibayarkan pada saat Wasit/Juri memimpin pertandingan *Multi Event* (POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub/PORNAS KOPRI, Standar Satuan Biaya Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.14
Satuan Biaya Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan

| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| 1 | Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan | OK | 200.000 |

7. SATUAN BIAYA SEWA

1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan *Insidentil*

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan *insidentil* merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/ bus sedang, dan roda 6 (enam)/ bus besar untuk kegiatan yang sifatnya *insidentil* (tidak bersifat terus - menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Catatan:

- a. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- b. Satuan Biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) *seat*.
- c. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- d. Bagi Tamu VVIP, VIP, Tamu Daerah, Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Wakil-Wakil Ketua DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/ satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/ *bersifat at cost*.

Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.15 sebagai berikut :

Tabel 1.15
Satuan Biaya Sewa Kendaraan insidentil

| NO | PROVINSI | SATUAN | RODA 4 (Rp) | RODA 6/ BUS SEDANG (Rp) | RODA 6/ BUS BESAR (Rp) |
|-----------|---------------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Aceh | Per hari | 930.000 | 3.282.000 | 4.638.000 |
| 2. | Sumatra utara | Per hari | 1.220.000 | 3.062.000 | 3.753.000 |
| 3. | Riau | Per hari | 978.000 | 3.155.000 | 4.585.000 |
| 4. | Kepulauan Riau | Per hari | 989.000 | 2.373.000 | 3.910.000 |
| 5. | Jambi | Per hari | 1.086.000 | 5.585.000 | 7.190.000 |
| 6. | Sumatra Barat | Per hari | 922.000 | 2.294.000 | 3.500.000 |
| 7. | Sumatra Selatan | Per hari | 1.507.000 | 2.200.000 | 4.097.000 |
| 8. | Lampung | Per hari | 846.000 | 3.594.000 | 5.052.000 |
| 9. | Bengkulu | Per hari | 985.000 | 5.145.000 | 6.924.000 |
| 10. | Bangka Belitung | Per hari | 1.258.000 | 3.477.000 | 5.342.000 |
| 11. | Banten | Per hari | 972.000 | 3.026.000 | 4.120.000 |
| 12. | Jawa Barat | Per hari | 932.000 | 2.563.000 | 3.519.000 |
| 13. | D.K.I. Jakarta | Per hari | 1.231.000 | 2.656.000 | 3.715.000 |
| 14. | Jawa Tengah | Per hari | 1.270.000 | 2.889.000 | 4.237.000 |
| 15. | D.I. Yogyakarta | Per hari | 978.000 | 2.427.000 | 3.720.000 |
| 16. | Jawa Timur | Per hari | 1.212.000 | 2.446.000 | 3.303.000 |
| 17. | Bali | Per hari | 1.250.000 | 3.174.000 | 4.224.000 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | Per hari | 1.103.000 | 2.532.000 | 3.369.000 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | Per hari | 926.000 | 3.059.000 | 3.468.000 |
| 20. | Kalimantan Barat | Per hari | 868.000 | 3.471.000 | 4.573.000 |
| 21. | Kalimantan Tengah | Per hari | 1.177.000 | 4.645.000 | 6.706.000 |
| 22. | Kalimantan Selatan | Per hari | 868.000 | 2.719.000 | 3.834.000 |
| 23. | Kalimantan Timur | Per hari | 1.100.000 | 3.112.000 | 4.829.000 |
| 24. | Kalimantan Utara | Per hari | 1.188.000 | 2.713.000 | 4.829.000 |
| 25. | Sulawesi Utara | Per hari | 1.195.000 | 2.498.000 | 3.845.000 |
| 26. | Gorontalo | Per hari | 856.000 | 2.504.000 | 4.038.000 |
| 27. | Sulawesi Barat | Per hari | 914.000 | 3.327.000 | 3.282.000 |
| 28. | Sulawesi Selatan | Per hari | 938.000 | 3.385.000 | 4.293.000 |
| 29. | Sulawesi Tengah | Per hari | 824.000 | 2.423.000 | 4.212.000 |

| NO | PROVINSI | SATUAN | RODA 4 (Rp) | RODA 6/ BUS SEDANG (Rp) | RODA 6/ BUS BESAR (Rp) |
|----------|-------------------|-----------|----------------|----------------------------------|------------------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> |
| 30. | Sulawesi Tenggara | Per hari | 945.000 | 2.700.000 | 5.150.000 |
| 31. | Maluku | Per hari | 1.241.000 | 3.590.000 | 4.021.000 |
| 32. | Maluku Utara | Per hari | 1.095.000 | 3.013.000 | 4.170.000 |
| 33. | Papua | Per hari | 1.204.000 | 4.082.000 | 5.248.000 |
| 34. | Papua Barat | Per hari | 1.171.000 | 3.499.000 | 4.547.000 |
| 35. | Papua Barat Daya | Per bulan | 1.171.000 | 3.499.000 | 4.547.000 |
| 36. | Papua Tengah | Per bulan | 1.204.000 | 4.082.000 | 5.248.000 |
| 37. | Papua Selatan | Per bulan | 1.638.000 | 6.001.000 | 7.715.000 |
| 38. | Papua Pegunungan | Per bulan | 1.649.000 | 6.041.000 | 7.767.000 |

2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/ atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Ketentuan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan ditetapkan sesuai Tabel 1.16 sebagai berikut :

Tabel 1.16
Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/ Operasional Kantor dan/ atau Lapangan.

a. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

| NO | PROVINSI | SATUAN | RODA 4 (Rp) |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| | Pejabat Eselon I | Per bulan | 17.660.000 |
| | Pejabat Eselon II | | |
| 1. | Aceh | Per bulan | 14.180.000 |
| 2. | Sumatra utara | Per bulan | 13.880.000 |
| 3. | Riau | Per bulan | 13.730.000 |
| 4. | Kepulauan Riau | Per bulan | 15.000.000 |
| 5. | Jambi | Per bulan | 13.500.000 |
| 6. | Sumatra Barat | Per bulan | 13.650.000 |
| 7. | Sumatra Selatan | Per bulan | 13.500.000 |
| 8. | Lampung | Per bulan | 13.430.000 |
| 9. | Bengkulu | Per bulan | 13.500.000 |
| 10. | Bangka Belitung | Per bulan | 12.750.000 |
| 11. | Banten | Per bulan | 13.950.000 |
| 12. | Jawa Barat | Per bulan | 13.950.000 |
| 13. | D.K.I. Jakarta | Per bulan | 13.250.000 |
| 14. | Jawa Tengah | Per bulan | 13.950.000 |
| 15. | D.I. Yogyakarta | Per bulan | 14.030.000 |
| 16. | Jawa Timur | Per bulan | 13.430.000 |
| 17. | Bali | Per bulan | 13.500.000 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | Per bulan | 13.650.000 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | Per bulan | 14.850.000 |
| 20. | Kalimantan Barat | Per bulan | 14.030.000 |
| 21. | Kalimantan Tengah | Per bulan | 14.140.000 |
| 22. | Kalimantan Selatan | Per bulan | 14.030.000 |
| 23. | Kalimantan Timur | Per bulan | 14.030.000 |
| 24. | Kalimantan Utara | Per bulan | 14.030.000 |
| 25. | Sulawesi Utara | Per bulan | 15.000.000 |
| 26. | Gorontalo | Per bulan | 15.000.000 |
| 27. | Sulawesi Barat | Per bulan | 13.580.000 |
| 28. | Sulawesi Selatan | Per bulan | 13.580.000 |
| 29. | Sulawesi Tengah | Per bulan | 14.400.000 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | Per bulan | 14.030.000 |
| 31. | Maluku | Per bulan | 14.480.000 |
| 32. | Maluku Utara | Per bulan | 14.400.000 |
| 33. | Papua | Per bulan | 14.850.000 |
| 34. | Papua Barat | Per bulan | 14.780.000 |
| 35. | Papua Barat Daya | Per bulan | 14.780.000 |
| 36. | Papua Tengah | Per bulan | 14.850.000 |
| 37. | Papua Selatan | Per bulan | 14.850.000 |
| 38. | Papua Pegunungan | Per bulan | 14.850.000 |

b. Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan

| NO | PROVINSI | SATUAN | PICK UP (Rp) | MINIBUS (Rp) | DOUBLE GARDAN (Rp) |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> |
| 1. | Aceh | Per bulan | 6.300.000 | 6.530.000 | 15.230.000 |
| 2. | Sumatra utara | Per bulan | 6.080.000 | 6.080.000 | 15.080.000 |

| NO | PROVINSI | SATUAN | PICK UP (Rp) | MINIBUS (Rp) | DOUBLE GARDAN (Rp) |
|----------|---------------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> |
| 3. | Riau | Per bulan | 5.930.000 | 6.000.000 | 15.000.000 |
| 4. | Kepulauan Riau | Per bulan | 7.130.000 | 7.350.000 | 16.130.000 |
| 5. | Jambi | Per bulan | 5.850.000 | 5.930.000 | 14.780.000 |
| 6. | Sumatra Barat | Per bulan | 5.930.000 | 6.150.000 | 14.850.000 |
| 7. | Sumatra Selatan | Per bulan | 5.550.000 | 5.850.000 | 14.780.000 |
| 8. | Lampung | Per bulan | 5.780.000 | 5.850.000 | 14.780.000 |
| 9. | Bengkulu | Per bulan | 5.930.000 | 5.930.000 | 14.780.000 |
| 10. | Bangka Belitung | Per bulan | 6.230.000 | 6.380.000 | 15.150.000 |
| 11. | Banten | Per bulan | 5.400.000 | 5.670.000 | 14.480.000 |
| 12. | Jawa Barat | Per bulan | 5.400.000 | 5.670.000 | 14.480.000 |
| 13. | D.K.I. Jakarta | Per bulan | 5.660.000 | 6.690.000 | 14.770.000 |
| 14. | Jawa Tengah | Per bulan | 5.630.000 | 5.850.000 | 14.520.000 |
| 15. | D.I. Yogyakarta | Per bulan | 5.630.000 | 5.850.000 | 14.520.000 |
| 16. | Jawa Timur | Per bulan | 5.630.000 | 5.850.000 | 14.630.000 |
| 17. | Bali | Per bulan | 5.930.000 | 6.000.000 | 14.930.000 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | Per bulan | 6.080.000 | 6.230.000 | 15.000.000 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | Per bulan | 7.130.000 | 7.350.000 | 16.130.000 |
| 20. | Kalimantan Barat | Per bulan | 6.380.000 | 6.530.000 | 15.230.000 |
| 21. | Kalimantan Tengah | Per bulan | 6.750.000 | 6.680.000 | 15.530.000 |
| 22. | Kalimantan Selatan | Per bulan | 6.720.000 | 6.530.000 | 15.380.000 |
| 23. | Kalimantan Timur | Per bulan | 6.380.000 | 7.200.000 | 15.230.000 |
| 24. | Kalimantan Utara | Per bulan | 6.380.000 | 7.200.000 | 15.230.000 |
| 25. | Sulawesi Utara | Per bulan | 7.350.000 | 7.500.000 | 16.280.000 |
| 26. | Gorontalo | Per bulan | 7.280.000 | 7.430.000 | 16.280.000 |
| 27. | Sulawesi Barat | Per bulan | 6.150.000 | 5.890.000 | 15.080.000 |
| 28. | Sulawesi Selatan | Per bulan | 6.150.000 | 5.890.000 | 15.080.000 |
| 29. | Sulawesi Tengah | Per bulan | 6.750.000 | 6.980.000 | 15.680.000 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | Per bulan | 6.900.000 | 6.380.000 | 15.900.000 |
| 31. | Maluku | Per bulan | 8.180.000 | 6.830.000 | 17.250.000 |
| 32. | Maluku Utara | Per bulan | 7.880.000 | 6.830.000 | 16.880.000 |
| 33. | Papua | Per bulan | 8.630.000 | 7.200.000 | 17.630.000 |
| 34. | Papua Barat | Per bulan | 8.480.000 | 7.130.000 | 17.330.000 |
| 35. | Papua Barat Daya | Per bulan | 8.480.000 | 7.130.000 | 17.330.000 |
| 36. | Papua Tengah | Per bulan | 8.630.000 | 7.200.000 | 17.630.000 |
| 37. | Papua Selatan | Per bulan | 8.630.000 | 7.200.000 | 17.630.000 |
| 38. | Papua Pegunungan | Per bulan | 8.630.000 | 7.200.000 | 17.630.000 |

8. SATUAN BIAYA JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAH

Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut :

8.1 Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti Dan Tenaga Tertentu Lainnya, Ajudan dan Patroli Pengawal.

Jasa Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Tenaga tertentu lainnya, Ajudan dan Patroli pengawal diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, Standar Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan

tenaga tertentu lainnya, Patroli pengawal diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.17 dan 1.18

Tabel 1.17
Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------|---|---------------|---------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 1 | Satpam/ Penjaga Malam dan pengemudi | OB | 2.000.000 |
| 2 | Petugas Kebersihan dan Pramubakti | OB | 2.000.000 |
| 3 | Satpam/ Penjaga Malam, Pengemudi, LO Bandara dan Pramubakti Khusus Badan Penghubung Jakarta | OB | 3.000.000 |
| 4 | Petugas Kebersihan Khusus Badan Penghubung Jakarta | OB | 3.000.000 |
| 5 | Tenaga tertentu lainnya | OB | 2.000.000 |
| 6 | Jasa Tenaga tertentu lainnya khusus Badan Penghubung Jakarta | OB | 3.000.000 |

Tabel 1.18
Jasa Ajudan dan Patroli Pengawal

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------|---|---------------|---------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 1 | Ajudan yang berasal dari TNI/POLRI/ASN/Non ASN | | |
| | a. Gubernur | OB | 10.000.000 |
| | b. Wakil Gubernur | OB | 8.000.000 |
| 2 | Patroli Pengawal dari TNI/POLRI | | |
| | a. Gubernur | OB | 7.000.000 |
| | b. Wakil Gubernur | OB | 5.000.000 |

Ketentuan Pemberian Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya/ Patroli pengawal sebagai berikut :

1. Untuk Kepala SKPD/ Pejabat setingkat Eselon II hanya diperbolehkan 1 (satu) orang pengemudi, kecuali untuk SKPD yang memberikan pelayanan khusus yang membutuhkan lebih dari 1(satu) orang Tenaga Pengemudi;
2. Untuk satpam dan petugas kebersihan tidak termasuk seragam dan perlengkapan;
3. Jasa Satpam/Penjaga Malam, Pengemudi, LO Bandara, Pramubakti dan Petugas Kebersihan Badan Penghubung Jakarta adalah Uang Jasa yang diberikan khusus untuk tenaga harian lepas Badan Penghubung Provinsi Bengkulu di Jakarta.
4. Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Jumlah Kuota THL yang ditetapkan per SKPD;

5. Pemberian Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dapat diberikan Tunjangan Kesejahteraan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Jasa Ajudan dan Patroli pengawal yang berasal dari TNI/POLRI harus dilengkapi dengan Surat Perintah (Sprin) dari instansi asal dan Surat Keputusan Pengangkatan dari Kepala Daerah sedangkan untuk Ajudan Non PNS hanya melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan dari Kepala Daerah;
7. Jasa Ajudan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan sepanjang yang bersangkutan tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai Ajudan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Pemberian Jasa Ajudan TNI/POLRI/Non ASN dan Patroli Pengawal dari TNI/POLRI diberikan paling banyak 12 (dua belas) bulan.

8.2 Jasa Pelayanan Kesehatan untuk Bantuan P3K dan Jasa Pengamanan Kegiatan

8.2.1 Jasa Pelayanan Kesehatan untuk Bantuan P3K

Jasa yang diberikan kepada petugas kesehatan yang membantu pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan pertama sebelum dirujuk ke Fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu;

8.2.2 Jasa Pengamanan Kegiatan

Jasa yang diberikan kepada ASN atau Non ASN dalam rangka Pengamanan suatu kegiatan atau Event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Tabel 1.19
pelayanan Bantuan P3K

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 1 | Jasa Dokter | OH | 300.000 |
| 2 | Jasa Perawat | OH | 200.000 |

Tabel 1.20
Jasa Pengamanan Kegiatan

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 1 | Jasa Pengamanan | OH | 125.000 |

8.3 Jasa THL Penyusun / Pengelola Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik Dan Media Sosial Khusus Media Center

Biaya jasa yang diberikan kepada THL yang melaksanakan tugas sebagai Penyusun/ Pengelola Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan

Media Sosial Khusus Media Center Provinsi Bengkulu yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.21

Honorarium Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center

| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
|----------|--|----------|--------------|
| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
| 1 | Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center | | |
| | a. Koordinator | OB | 5.250.000 |
| | b. Anggota | OB | 3.000.000 |

8.4 Jasa Konsultan Hukum/Pengacara Hukum

Biaya Jasa yang diberikan kepada praktisi hukum yang memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu diatur dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 1.22

Jasa Konsultan Hukum/Pengacara Hukum

| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
|----------|---|----------|--------------|
| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
| 1 | Honorarium Konsultan Hukum/ Pengacara (<i>Advokat</i>) | OP | 50.000.000 |

8.5 Satuan Biaya Jasa Pengurus Rumah Ibadah

Jasa yang diberikan kepada Pengurus Rumah Ibadah Baitul Izzah diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.23

Satuan Biaya Jasa Pengurus Rumah Ibadah

| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
|----------|----------------------------------|----------|--------------|
| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
| 1 | Honorarium Pengurus Rumah Ibadah | | |
| | a. Ketua Umum | OB | 1.200.000 |
| | b. Sekretaris | OB | 1.000.000 |
| | c. Imam Besar | OB | 1.500.000 |
| | d. Imam II-V | OB | 1.250.000 |
| | e. Muazin I | OB | 1.000.000 |
| | f. Muazin II-V | OB | 900.000 |

8.6 Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional dalam Tim Kegiatan Pemerintah

1. Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional merupakan Upah/ Imbalan yang diberikan kepada suatu badan usaha/ lembaga/ perorangan dengan kompetensi pada bidangnya masing-masing yang berasal dari Pihak Luar atau dalam Pemerintah Provinsi Bengkulu;
2. Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.24
Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional

| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
|----------|-------------------------------|----------|-----------|
| 1 | Profesor/ S3 yang disetarakan | OH | 1.700.000 |
| 2 | S2 yang disetarakan | OH | 1.000.000 |
| 3 | S1/D3 yang disetarakan | OH | 800.000 |

Ketentuan :

- Untuk Satuan Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional dapat diberikan Orang Bulan (OB) dan Orang Kali (OK), dengan besaran dasar penghitungan adalah besaran Orang Hari (OH);
- Pemberian untuk Orang Bulan (OB) dengan besaran maksimum sebesar standar OH dikalikan rata-rata hari kerja dalam satu bulan dan dikalikan maksimum 75 %;
- Pemberian untuk Orang Kegiatan (OK) berdasarkan *output* hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- Memiliki Jabatan Akademik/ sertifikat keahlian/ Rekomendasi dari Lembaga resmi profesi pada bidangnya/ tanda bukti pengalaman pekerjaan pada keahlian dimilikinya;

8.7 Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer

Biaya Jasa yang diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagai upah/ imbalan dalam melaksanakan tugasnya sebagai *Programmer Senior* dan *Programmer Junior*;

Standar Satuan Biaya Jasa Tenaga *Programmer* diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.25
Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer

| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
|----------|-------------------|----------|-----------|
| 1 | Programmer Senior | OB | 6.000.000 |
| 2 | Programmer Junior | OB | 4.500.000 |

8.8 Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu

Biaya jasa yang diberikan kepada petugas Penjaga Telur Penyu dalam rangka pelestarian biota laut yang dilindungi. Standar Satuan Biaya Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.26
Satuan Biaya Jasa Petugas Telur Penyu

| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
|----------|----------------------------------|----------|----------|
| 1 | Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu | OB | 350.000 |

8.9 Jasa Petugas Pintu Air (PPA)

Biaya Jasa yang diberikan kepada petugas pintu air yang merupakan daerah irigasi kewenangan di Provinsi Bengkulu. Standar biaya jasa Petugas Pintu Air diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.27
Satuan Biaya Jasa Petugas Pintu Air

| <u>NO</u> | <u>URAIAN</u> | <u>SATUAN</u> | <u>BESARAN (RP)</u> |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 1 | Petugas Pintu Air (PPA) | OB | 500.000 |

8.10 Satuan Biaya Jasa Tata Rias

Biaya Jasa yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang memiliki kompetensi di Bidang tata rias atau kecantikan atas jasa tata rias dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau acara-acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, Standar biaya jasa Tata Rias diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.28
Satuan Biaya Jasa Tata Rias

| <u>NO</u> | <u>URAIAN</u> | <u>SATUAN</u> | <u>BESARAN (RP)</u> |
|-----------|----------------------------------|---------------|---------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| | Jasa Tata Rias | | |
| 1 | Jasa Salon Kecantikan Paskibraka | OK | 100.000 |
| 2 | Jasa Potong rambut Paskibraka | OK | 50.000 |

8.11 Satuan Biaya Jasa Tim Seleksi dan Jasa Tim Pelatih Paskibraka

Biaya Jasa yang diberikan kepada Tim Seleksi dan Tim Pelatih Paskibraka yang ditunjuk atas kecakapan/ keahlian dalam memilih anggota Paskibraka dan menjadi Instruktur/ Pelatih anggota Paskibraka Provinsi Bengkulu, Standar biaya jasa Tim Seleksi dan jasa Tim Pelatih Paskibraka diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.29
Satuan Biaya Jasa Tim Seleksi dan Tim Pelatih Paskibraka

| <u>NO</u> | <u>URAIAN</u> | <u>SATUAN</u> | <u>BESARAN (RP)</u> |
|-----------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 1 | Jasa Tim Seleksi Paskibraka | OK | 1.000.000 |
| 2 | Jasa Tim Pelatih Paskibraka | OH | 150.000 |

8.12 Satuan Biaya Jasa Pelatih dan Asisten Pelatih

Biaya Jasa yang diberikan kepada Tim Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas kecakapan/ keahlian dan memperhatikan prinsip efektif dan efisien dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.30
Satuan Biaya Jasa Pelatih dan Asisten Pelatih

| <u>NO</u> | <u>URAIAN</u> | <u>SATUAN</u> | <u>BESARAN (RP)</u> |
|-----------|-----------------|---------------|---------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 1 | Pelatih | OB | 2.500.000 |
| 2 | Asisten Pelatih | OB | 2.300.000 |

9. SATUAN BIAYA REWARD/PENGHARGAAN

Reward/ Penghargaan yang diberikan kepada Atlet/Pelatih sebagai bentuk penghargaan kepada Atlet/ Pelatih berprestasi yang telah menyumbangkan Medali Emas, Perak atau Perunggu dalam rangka mengikuti perlombaan :

- a. POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub;
- b. Pekan Olahraga Nasional (PON).

Standar Satuan Biaya Reward/ Penghargaan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.31
Satuan Biaya Reward/ Penghargaan

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (RP) |
|-----------------|--|-----------------|---------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 1 | POPWIL/POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub; | | |
| | a. Emas | OK | 25.000.000 |
| | b. Perak | OK | 15.000.000 |
| | c. Perunggu | OK | 10.000.000 |
| 2 | Pekan Olahraga Nasional (PON) | | |
| | a. Emas | OK | 150.000.000 |
| | b. Perak | OK | 100.000.000 |
| | c. Perunggu | OK | 75.000.000 |

10. SATUAN BIAYA KONTRIBUSI ASOSIASI

Satuan Biaya Kontribusi Asosiasi merupakan Iuran atau Kontribusi yang diberikan kepada Asosiasi yang menaungi organisasi yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Standar Biaya Kontribusi Asosiasi ditetapkan sesuai Tabel berikut :

Tabel 1.32
Satuan Biaya Kontribusi Asosiasi

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (RP) |
|-----------------|---|-----------------|---------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 1 | Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) | Tahun | 90.000.000 |
| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (RP) |
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 2 | Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI) | Tahun | 20.000.000 |

11. SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN

Biaya Jasa Tenaga Kesehatan diberikan khusus kepada Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Dokter Umum baik yang tercatat sebagai ASN ataupun Non ASN, Psikolog Klinis dan Terapis Wicara Non ASN. Standar Biaya Jasa Tenaga Kesehatan ditetapkan sesuai Tabel berikut :

Tabel 1.33
Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 1 | Dokter Spesialis Jiwa (ASN) | Orang/Bulan | 20.000.000 |
| 2 | Dokter Spesialis Jiwa (Non ASN) | Orang/Bulan | 30.000.000 |
| 3 | Dokter Spesialis | Orang/Bulan | 15.000.000 |
| 4 | Dokter Umum/ Psikolog Klinis | Orang/Bulan | 3.000.000 |
| 5 | Okupasi Terapi/ Terapi Wicara | Orang/Bulan | 2.500.000 |

Keterangan :

Khusus Dokter Spesialis Jiwa (ASN) dapat diberikan biaya jasa dimaksud sepanjang yang bersangkutan tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi.

12. SATUAN BIAYA BELANJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Satuan Biaya Belanja Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan merupakan Biaya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II ditetapkan sesuai Tabel berikut :

Tabel 1.34
Satuan Biaya Belanja Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------|--------------------------------|---------------|---------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 1 | Diklat Kepemimpinan Tingkat II | OK | 30.300.000 |

13. SATUAN BIAYA TUGAS BELAJAR PENDIDIKAN PNS

Biaya yang diberikan dalam rangka Tugas Belajar Pendidikan PNS kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti tugas belajar utusan Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang disamakan, Satuan Biaya Tugas Belajar Pendidikan PNS ditetapkan sesuai Tabel berikut :

Tabel 1.35
Satuan Biaya Tugas Belajar Pendidikan PNS

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------|--------------------------------------|---------------|---------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 1 | Belanja Tugas Belajar S1 | Orang/Tahun | 43.650.000 |
| 2 | Belanja Tugas Belajar S2/Spesialis 1 | Orang/Tahun | 52.520.000 |
| 3 | Belanja Tugas Belajar S3/Spesialis 2 | Orang/Tahun | 64.380.000 |

Keterangan :

- a. Besaran biaya Tugas Belajar Pendidikan Tugas Belajar PNS yang diberikan merupakan Tunjangan Biaya Hidup, Pemandokan, Tunjangan Peralatan, Tunjangan Perkuliahan dan Tunjangan Belajar.

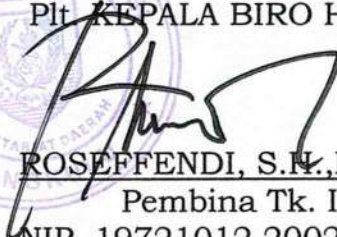
- b. Besaran biaya Tugas Belajar Pendidikan PNS yang diberikan merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.
- c. Besaran biaya Tugas Belajar Pendidikan PNS yang melebihi dari ketentuan di atas menjadi kewajiban atau beban dari PNS yang bersangkutan.

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



ROSEFFENDI, S.N., M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19721012 200212 1 004



| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|----------|----------|--------------|--------------------|--------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS (Rp) | EKONOMI (Rp) |
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> |
| 129. | BATAM | PONTIANAK | 7.594.000 | 4.396.000 |
| 130. | BATAM | SEMARANG | 7.145.000 | 3.861.000 |
| 131. | BATAM | SOLO | 7.145.000 | 4.000.000 |
| 132. | BATAM | SURABAYA | 8.600.000 | 4.300.000 |
| 133. | BATAM | TIMIKA | 16.119.000 | 8.621.000 |
| 134. | BENGGULU | PALEMBANG | 2.899.000 | 1.893.000 |
| 135. | BIAK | BALIKPAPAN | 18.622.000 | 9.477.000 |
| 136. | BIAK | BANDA ACEH | 18.718.000 | 10.108.000 |
| 137. | BIAK | BATAM | 16.333.000 | 8.664.000 |
| 138. | BIAK | DENPASAR | 16.729.000 | 8.995.000 |
| 139. | BIAK | JAYAPURA | 3.615.000 | 2.321.000 |
| 140. | BIAK | YOGYAKARTA | 15.648.000 | 8.108.000 |
| 141. | BIAK | MANADO | 11.734.000 | 6.353.000 |
| 142. | BIAK | MEDAN | 18.472.000 | 9.498.000 |
| 143. | BIAK | PADANG | 16.932.000 | 8.728.000 |
| 144. | BIAK | PALEMBANG | 15.424.000 | 8.108.000 |
| 145. | BIAK | PEKANBARU | 16.985.000 | 8.781.000 |
| 146. | BIAK | PONTIANAK | 15.873.000 | 8.568.000 |
| 147. | BIAK | SURABAYA | 12.782.000 | 7.081.000 |
| 148. | BIAK | TIMIKA | 5.808.000 | 3.444.000 |
| 149. | DENPASAR | JAYAPURA | 11.680.000 | 6.845.000 |
| 150. | DENPASAR | KUPANG | 5.091.000 | 2.952.000 |
| 151. | DENPASAR | MAKASSAR | 4.182.000 | 2.631.000 |
| 152. | DENPASAR | MANADO | 7.851.000 | 4.278.000 |
| 153. | DENPASAR | MATARAM | 1.840.000 | 1.390.000 |
| 154. | DENPASAR | MEDAN | 10.589.000 | 5.658.000 |
| 155. | DENPASAR | PADANG | 9.049.000 | 4.888.000 |
| 156. | DENPASAR | PALANGKARAYA | 8.557.000 | 4.909.000 |
| 157. | DENPASAR | PALEMBANG | 7.541.000 | 4.278.000 |
| 158. | DENPASAR | PEKANBARU | 9.092.000 | 4.942.000 |
| 159. | DENPASAR | PONTIANAK | 7.990.000 | 4.738.000 |
| 160. | DENPASAR | TIMIKA | 10.140.000 | 6.129.000 |
| 161. | JAMBI | BALIKPAPAN | 7.733.000 | 4.407.000 |
| 162. | JAMBI | BANJARMASIN | 7.690.000 | 4.193.000 |
| 163. | JAMBI | DENPASAR | 7.733.000 | 4.439.000 |
| 164. | JAMBI | YOGYAKARTA | 6.653.000 | 3.551.000 |
| 165. | JAMBI | KUPANG | 11.434.000 | 6.075.000 |
| 166. | JAMBI | MAKASSAR | 9.659.000 | 4.952.000 |
| 167. | JAMBI | MALANG | 7.091.000 | 3.925.000 |
| 168. | JAMBI | MANADO | 12.707.000 | 6.097.000 |
| 169. | JAMBI | PALANGKARAYA | 7.444.000 | 4.193.000 |
| 170. | JAMBI | PONTIANAK | 6.878.000 | 4.011.000 |
| 171. | JAMBI | SEMARANG | 6.428.000 | 3.476.000 |
| 172. | JAMBI | SOLO | 6.428.000 | 3.615.000 |
| 173. | JAMBI | SURABAYA | 7.883.000 | 3.915.000 |
| 174. | JAYAPURA | YOGYAKARTA | 13.274.000 | 7.690.000 |
| 175. | JAYAPURA | MANADO | 22.109.000 | 11.263.000 |

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN
2025

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat dan Kegiatan;
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi/ pembicara khusus dan public figur) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 1 | Honorarium Narasumber | OJ | 1.700.000 |
| 2 | Honorarium Moderator | OK | 1.000.000 |
| 3 | Honorarium Pembawa Acara | OK | 750.000 |

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi/ pembicara khusus dan public figur) dapat dibayarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka (*luring/ offline*) ataupun secara *online* (*daring*) melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*pembiayaan secara at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pergi Pulang (PP)

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|----------|----------|----------------|--------------------|--------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS (Rp) | EKONOMI (Rp) |
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> |
| 1. | BENGKULU | JAKARTA | 4.364.000 | 2.621.000 |
| 2. | JAKARTA | AMBON | 13.285.000 | 7.081.000 |
| 3. | JAKARTA | BALIKPAPAN | 7.412.000 | 3.797.000 |
| 4. | JAKARTA | BANDA ACEH | 7.519.000 | 4.492.000 |
| 5. | JAKARTA | BANDAR LAMPUNG | 2.407.000 | 1.583.000 |
| 6. | JAKARTA | BANJARMASIN | 5.252.000 | 2.995.000 |
| 7. | JAKARTA | BATAM | 4.867.000 | 2.888.000 |
| 8. | JAKARTA | BIAK | 14.065.000 | 7.519.000 |
| 9. | JAKARTA | DENPASAR | 5.305.000 | 3.262.000 |
| 10. | JAKARTA | GORONTALO | 7.231.000 | 4.824.000 |
| 11. | JAKARTA | JAMBI | 4.065.000 | 2.460.000 |
| 12. | JAKARTA | JAYAPURA | 14.568.000 | 8.193.000 |
| 13. | JAKARTA | YOGYAKARTA | 4.107.000 | 2.268.000 |
| 14. | JAKARTA | KENDARI | 7.658.000 | 4.182.000 |
| 15. | JAKARTA | KUPANG | 9.413.000 | 5.081.000 |
| 16. | JAKARTA | MAKASSAR | 7.444.000 | 3.829.000 |
| 17. | JAKARTA | MALANG | 4.599.000 | 2.695.000 |
| 18. | JAKARTA | MAMUJU | 7.295.000 | 4.867.000 |
| 19. | JAKARTA | MANADO | 10.824.000 | 5.102.000 |
| 20. | JAKARTA | MANOKWARI | 16.226.000 | 10.824.000 |
| 21. | JAKARTA | MATARAM | 5.316.000 | 3.230.000 |
| 22. | JAKARTA | MEDAN | 7.252.000 | 3.808.000 |
| 23. | JAKARTA | PADANG | 5.530.000 | 2.952.000 |
| 24. | JAKARTA | PALANGKARAYA | 4.984.000 | 2.984.000 |
| 25. | JAKARTA | PALEMBANG | 3.861.000 | 2.268.000 |
| 26. | JAKARTA | PALU | 9.348.000 | 5.113.000 |
| 27. | JAKARTA | PANGKAL PINANG | 3.412.000 | 2.139.000 |
| 28. | JAKARTA | PEKANBARU | 5.583.000 | 3.016.000 |
| 29. | JAKARTA | PONTIANAK | 4.353.000 | 2.781.000 |
| 30. | JAKARTA | SEMARANG | 3.861.000 | 2.182.000 |
| 31. | JAKARTA | SOLO | 3.861.000 | 2.342.000 |
| 32. | JAKARTA | SURABAYA | 5.466.000 | 2.674.000 |
| 33. | JAKARTA | TERNATE | 10.001.000 | 6.664.000 |
| 34. | JAKARTA | TIMIKA | 13.830.000 | 7.487.000 |
| 35. | AMBON | DENPASAR | 8.054.000 | 4.471.000 |

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|----------|----------------|-------------|--------------------|--------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS (Rp) | EKONOMI (Rp) |
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> |
| 36. | AMBON | JAYAPURA | 7.434.000 | 4.161.000 |
| 37. | AMBON | KENDARI | 4.824.000 | 2.856.000 |
| 38. | AMBON | MAKASSAR | 6.022.000 | 3.455.000 |
| 39. | AMBON | MANOKWARI | 5.177.000 | 3.027.000 |
| 40. | AMBON | PALU | 6.140.000 | 3.508.000 |
| 41. | AMBON | SORONG | 3.637.000 | 2.257.000 |
| 42. | AMBON | SURABAYA | 8.803.000 | 4.845.000 |
| 43. | AMBON | TERNATE | 4.022.000 | 2.449.000 |
| 44. | BALIKPAPAN | BANDA ACEH | 12.739.000 | 6.749.000 |
| 45. | BALIKPAPAN | BATAM | 10.354.000 | 5.305.000 |
| 46. | BALIKPAPAN | DENPASAR | 10.739.000 | 5.648.000 |
| 47. | BALIKPAPAN | JAYAPURA | 19.071.000 | 10.086.000 |
| 48. | BALIKPAPAN | YOGYAKARTA | 9.669.000 | 4.749.000 |
| 49. | BALIKPAPAN | MAKASSAR | 12.664.000 | 6.150.000 |
| 50. | BALIKPAPAN | MANADO | 15.702.000 | 7.295.000 |
| 51. | BALIKPAPAN | MEDAN | 12.493.000 | 6.140.000 |
| 52. | BALIKPAPAN | PADANG | 10.942.000 | 5.369.000 |
| 53. | BALIKPAPAN | PALEMBANG | 9.445.000 | 4.749.000 |
| 54. | BALIKPAPAN | PEKANBARU | 10.996.000 | 5.423.000 |
| 55. | BALIKPAPAN | SEMARANG | 9.445.000 | 4.674.000 |
| 56. | BALIKPAPAN | SOLO | 9.445.000 | 4.813.000 |
| 57. | BALIKPAPAN | SURABAYA | 10.889.000 | 5.113.000 |
| 58. | BALIKPAPAN | TIMIKA | 18.408.000 | 9.445.000 |
| 59. | BANDA ACEH | DENPASAR | 10.835.000 | 6.279.000 |
| 60. | BANDA ACEH | JAYAPURA | 19.167.000 | 10.717.000 |
| 61. | BANDA ACEH | YOGYAKARTA | 9.765.000 | 5.380.000 |
| 62. | BANDA ACEH | MAKASSAR | 12.760.000 | 6.781.000 |
| 63. | BANDA ACEH | MANADO | 15.798.000 | 7.926.000 |
| 64. | BANDA ACEH | PONTIANAK | 9.990.000 | 5.840.000 |
| 65. | BANDA ACEH | SEMARANG | 9.530.000 | 5.305.000 |
| 66. | BANDA ACEH | SOLO | 9.530.000 | 5.444.000 |
| 67. | BANDA ACEH | SURABAYA | 10.985.000 | 5.744.000 |
| 68. | BANDA ACEH | TIMIKA | 18.504.000 | 10.076.000 |
| 69. | BANDAR LAMPUNG | BALIKPAPAN | 8.129.000 | 4.129.000 |
| 70. | BANDAR LAMPUNG | BANDA ACEH | 8.225.000 | 4.760.000 |
| 71. | BANDAR LAMPUNG | BANJARMASIN | 6.193.000 | 3.412.000 |
| 72. | BANDAR LAMPUNG | BATAM | 5.840.000 | 3.316.000 |
| 73. | BANDAR LAMPUNG | BIAK | 14.119.000 | 7.487.000 |
| 74. | BANDAR LAMPUNG | DENPASAR | 6.236.000 | 3.647.000 |
| 75. | BANDAR LAMPUNG | JAYAPURA | 14.568.000 | 8.097.000 |
| 76. | BANDAR LAMPUNG | YOGYAKARTA | 5.155.000 | 2.760.000 |
| 77. | BANDAR LAMPUNG | KENDARI | 8.354.000 | 4.482.000 |
| 78. | BANDAR LAMPUNG | MAKASSAR | 8.161.000 | 4.161.000 |
| 79. | BANDAR LAMPUNG | MALANG | 5.594.000 | 3.134.000 |
| 80. | BANDAR LAMPUNG | MANADO | 11.199.000 | 5.305.000 |
| 81. | BANDAR LAMPUNG | MATARAM | 6.246.000 | 3.626.000 |

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|----------|----------------|----------------|--------------------|--------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS (Rp) | EKONOMI (Rp) |
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> |
| 82. | BANDAR LAMPUNG | MEDAN | 7.979.000 | 4.150.000 |
| 83. | BANDAR LAMPUNG | PADANG | 6.439.000 | 3.380.000 |
| 84. | BANDAR LAMPUNG | PALANGKARAYA | 5.947.000 | 3.401.000 |
| 85. | BANDAR LAMPUNG | PALEMBANG | 4.931.000 | 2.760.000 |
| 86. | BANDAR LAMPUNG | PEKANBARU | 6.482.000 | 3.433.000 |
| 87. | BANDAR LAMPUNG | PONTIANAK | 5.380.000 | 3.220.000 |
| 88. | BANDAR LAMPUNG | SEMARANG | 4.931.000 | 2.685.000 |
| 89. | BANDAR LAMPUNG | SOLO | 4.931.000 | 2.824.000 |
| 90. | BANDAR LAMPUNG | SURABAYA | 6.386.000 | 3.123.000 |
| 91. | BANDAR LAMPUNG | TIMIKA | 13.905.000 | 7.455.000 |
| 92. | BANDUNG | BATAM | 6.289.000 | 3.583.000 |
| 93. | BANDUNG | DENPASAR | 5.626.000 | 3.252.000 |
| 94. | BANDUNG | JAKARTA | 2.064.000 | 1.476.000 |
| 95. | BANDUNG | JAMBI | 5.006.000 | 2.941.000 |
| 96. | BANDUNG | YOGYAKARTA | 3.369.000 | 2.129.000 |
| 97. | BANDUNG | PADANG | 6.129.000 | 3.508.000 |
| 98. | BANDUNG | PALEMBANG | 4.385.000 | 2.631.000 |
| 99. | BANDUNG | PANGKAL PINANG | 4.599.000 | 2.738.000 |
| 100. | BANDUNG | PEKANBARU | 6.525.000 | 3.701.000 |
| 101. | BANDUNG | SEMARANG | 3.027.000 | 1.957.000 |
| 102. | BANDUNG | SOLO | 3.647.000 | 2.268.000 |
| 103. | BANDUNG | SURABAYA | 4.824.000 | 2.856.000 |
| 104. | BANDUNG | TANJUNG PANDAN | 4.439.000 | 2.663.000 |
| 105. | BANJARMASIN | BANDA ACEH | 10.792.000 | 6.022.000 |
| 106. | BANJARMASIN | BATAM | 8.407.000 | 4.578.000 |
| 107. | BANJARMASIN | BIAK | 16.686.000 | 8.749.000 |
| 108. | BANJARMASIN | DENPASAR | 8.792.000 | 4.920.000 |
| 109. | BANJARMASIN | JAYAPURA | 17.135.000 | 9.359.000 |
| 110. | BANJARMASIN | YOGYAKARTA | 7.723.000 | 4.022.000 |
| 111. | BANJARMASIN | MEDAN | 10.546.000 | 5.412.000 |
| 112. | BANJARMASIN | PADANG | 9.006.000 | 4.642.000 |
| 113. | BANJARMASIN | PALEMBANG | 7.498.000 | 4.022.000 |
| 114. | BANJARMASIN | PEKANBARU | 9.049.000 | 4.696.000 |
| 115. | BANJARMASIN | SEMARANG | 7.498.000 | 3.958.000 |
| 116. | BANJARMASIN | SOLO | 7.498.000 | 4.097.000 |
| 117. | BANJARMASIN | SURABAYA | 8.942.000 | 4.385.000 |
| 118. | BANJARMASIN | TIMIKA | 16.472.000 | 8.717.000 |
| 119. | BATAM | BANDA ACEH | 10.439.000 | 5.936.000 |
| 120. | BATAM | DENPASAR | 8.450.000 | 4.824.000 |
| 121. | BATAM | JAYAPURA | 16.782.000 | 9.263.000 |
| 122. | BATAM | YOGYAKARTA | 7.370.000 | 3.936.000 |
| 123. | BATAM | MAKASSAR | 10.375.000 | 5.337.000 |
| 124. | BATAM | MANADO | 13.413.000 | 6.482.000 |
| 125. | BATAM | MEDAN | 10.193.000 | 5.316.000 |
| 126. | BATAM | PADANG | 8.653.000 | 4.546.000 |
| 127. | BATAM | PALEMBANG | 7.145.000 | 3.936.000 |
| 128. | BATAM | PEKANBARU | 8.707.000 | 4.599.000 |

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|----------|------------|-------------|--------------------|--------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS (Rp) | EKONOMI (Rp) |
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> |
| 176. | JAYAPURA | MEDAN | 18.932.000 | 10.097.000 |
| 177. | JAYAPURA | PADANG | 17.381.000 | 9.327.000 |
| 178. | JAYAPURA | PALEMBANG | 15.873.000 | 8.717.000 |
| 179. | JAYAPURA | PEKANBARU | 17.435.000 | 9.380.000 |
| 180. | JAYAPURA | PONTIANAK | 16.322.000 | 9.177.000 |
| 181. | JAYAPURA | TIMIKA | 3.615.000 | 2.289.000 |
| 182. | YOGYAKARTA | DENPASAR | 3.861.000 | 2.481.000 |
| 183. | YOGYAKARTA | MAKASSAR | 6.525.000 | 3.893.000 |
| 184. | YOGYAKARTA | MANADO | 10.536.000 | 5.722.000 |
| 185. | YOGYAKARTA | MEDAN | 9.519.000 | 4.770.000 |
| 186. | YOGYAKARTA | PADANG | 7.969.000 | 4.000.000 |
| 187. | YOGYAKARTA | PALEMBANG | 6.460.000 | 3.380.000 |
| 188. | YOGYAKARTA | PEKANBARU | 8.022.000 | 4.054.000 |
| 189. | YOGYAKARTA | PONTIANAK | 6.910.000 | 3.840.000 |
| 190. | YOGYAKARTA | TIMIKA | 11.894.000 | 7.038.000 |
| 191. | KENDARI | BANDA ACEH | 12.953.000 | 7.102.000 |
| 192. | KENDARI | BATAM | 10.568.000 | 5.658.000 |
| 193. | KENDARI | DENPASAR | 5.455.000 | 3.273.000 |
| 194. | KENDARI | YOGYAKARTA | 8.129.000 | 4.706.000 |
| 195. | KENDARI | PADANG | 11.167.000 | 5.722.000 |
| 196. | KENDARI | PALEMBANG | 9.659.000 | 5.102.000 |
| 197. | KENDARI | PEKANBARU | 11.220.000 | 5.776.000 |
| 198. | KENDARI | SEMARANG | 9.659.000 | 5.027.000 |
| 199. | KENDARI | SOLO | 9.659.000 | 5.166.000 |
| 200. | KENDARI | SURABAYA | 11.103.000 | 5.466.000 |
| 201. | KENDARI | TIMIKA | 18.633.000 | 9.798.000 |
| 202. | KUPANG | JAYAPURA | 14.386.000 | 8.108.000 |
| 203. | KUPANG | YOGYAKARTA | 7.348.000 | 4.182.000 |
| 204. | KUPANG | MAKASSAR | 7.637.000 | 4.311.000 |
| 205. | KUPANG | MANADO | 11.648.000 | 6.140.000 |
| 206. | KUPANG | SURABAYA | 6.749.000 | 3.722.000 |
| 207. | MAKASSAR | BIAK | 8.493.000 | 4.931.000 |
| 208. | MAKASSAR | JAYAPURA | 10.193.000 | 5.787.000 |
| 209. | MAKASSAR | KENDARI | 2.663.000 | 1.786.000 |
| 210. | MAKASSAR | MANADO | 5.327.000 | 2.909.000 |
| 211. | MAKASSAR | TIMIKA | 11.723.000 | 6.567.000 |
| 212. | MALANG | BALIKPAPAN | 10.108.000 | 5.134.000 |
| 213. | MALANG | BANDA ACEH | 10.204.000 | 5.765.000 |
| 214. | MALANG | BANJARMASIN | 8.161.000 | 4.407.000 |
| 215. | MALANG | BATAM | 7.819.000 | 4.311.000 |
| 216. | MALANG | BIAK | 16.087.000 | 8.482.000 |
| 217. | MALANG | JAYAPURA | 16.536.000 | 9.092.000 |
| 218. | MALANG | KENDARI | 10.322.000 | 5.487.000 |
| 219. | MALANG | MAKASSAR | 10.129.000 | 5.166.000 |
| 220. | MALANG | MANADO | 13.167.000 | 6.311.000 |
| 221. | MALANG | MEDAN | 9.958.000 | 5.145.000 |
| 222. | MALANG | PADANG | 8.418.000 | 4.385.000 |

| NO. | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|----------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS (Rp) | EKONOMI (Rp) |
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> |
| 223. | MALANG | PALANGKARAYA | 7.915.000 | 4.407.000 |
| 224. | MALANG | PALEMBANG | 6.899.000 | 3.765.000 |
| 225. | MALANG | PEKANBARU | 8.461.000 | 4.439.000 |
| 226. | MALANG | TIMIKA | 15.873.000 | 8.461.000 |
| 227. | MANADO | MEDAN | 15.552.000 | 7.316.000 |
| 228. | MANADO | PADANG | 14.012.000 | 6.546.000 |
| 229. | MANADO | PALEMBANG | 12.504.000 | 5.926.000 |
| 230. | MANADO | PEKANBARU | 14.055.000 | 6.599.000 |
| 231. | MANADO | PONTIANAK | 12.953.000 | 6.396.000 |
| 232. | MANADO | SEMARANG | 12.504.000 | 5.851.000 |
| 233. | MANADO | SOLO | 12.504.000 | 5.990.000 |
| 234. | MANADO | SURABAYA | 9.937.000 | 5.262.000 |
| 235. | MANADO | TIMIKA | 16.183.000 | 8.995.000 |
| 236. | MATARAM | BALIKPAPAN | 10.750.000 | 5.615.000 |
| 237. | MATARAM | BANDA ACEH | 10.846.000 | 6.246.000 |
| 238. | MATARAM | BANJARMASIN | 8.803.000 | 4.888.000 |
| 239. | MATARAM | BATAM | 8.461.000 | 4.803.000 |
| 240. | MATARAM | BIAK | 11.552.000 | 6.546.000 |
| 241. | MATARAM | JAYAPURA | 13.092.000 | 7.327.000 |
| 242. | MATARAM | YOGYAKARTA | 4.417.000 | 2.781.000 |
| 243. | MATARAM | MAKASSAR | 4.717.000 | 2.909.000 |
| 244. | MATARAM | MANADO | 8.717.000 | 4.738.000 |
| 245. | MATARAM | MEDAN | 10.600.000 | 5.637.000 |
| 246. | MATARAM | PADANG | 9.060.000 | 4.867.000 |
| 247. | MATARAM | PALEMBANG | 7.551.000 | 4.246.000 |
| 248. | MATARAM | PEKANBARU | 9.102.000 | 4.909.000 |
| 249. | MATARAM | PONTIANAK | 8.001.000 | 4.706.000 |
| 250. | MATARAM | SURABAYA | 3.829.000 | 2.321.000 |
| 251. | MEDAN | BANDA ACEH | 3.466.000 | 2.193.000 |
| 252. | MEDAN | MAKASSAR | 12.514.000 | 6.172.000 |
| 253. | MEDAN | PONTIANAK | 9.733.000 | 5.230.000 |
| 254. | MEDAN | SEMARANG | 9.284.000 | 4.696.000 |
| 255. | MEDAN | SOLO | 9.284.000 | 4.835.000 |
| 256. | MEDAN | SURABAYA | 10.739.000 | 5.134.000 |
| 257. | MEDAN | TIMIKA | 18.258.000 | 9.455.000 |
| 258. | PADANG | MAKASSAR | 10.974.000 | 5.402.000 |
| 259. | PADANG | PONTIANAK | 8.193.000 | 4.460.000 |
| 260. | PADANG | SEMARANG | 7.744.000 | 3.925.000 |
| 261. | PADANG | SOLO | 7.744.000 | 4.065.000 |
| 262. | PADANG | SURABAYA | 9.199.000 | 4.364.000 |
| 263. | PADANG | TIMIKA | 16.718.000 | 8.685.000 |
| 264. | PALANGKARAYA | BANDA ACEH | 10.546.000 | 6.022.000 |
| 265. | PALANGKARAYA | BATAM | 8.161.000 | 4.578.000 |
| 266. | PALANGKARAYA | YOGYAKARTA | 7.477.000 | 4.022.000 |
| 267. | PALANGKARAYA | MATARAM | 8.557.000 | 4.888.000 |
| 268. | PALANGKARAYA | MEDAN | 10.300.000 | 5.412.000 |
| 269. | PALANGKARAYA | PADANG | 8.760.000 | 4.642.000 |

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|----------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS (Rp) | EKONOMI (Rp) |
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> |
| 270. | PALANGKARAYA | PALEMBANG | 7.252.000 | 4.022.000 |
| 271. | PALANGKARAYA | PEKANBARU | 8.803.000 | 4.696.000 |
| 272. | PALANGKARAYA | SEMARANG | 7.252.000 | 3.947.000 |
| 273. | PALANGKARAYA | SOLO | 7.252.000 | 4.086.000 |
| 274. | PALANGKARAYA | SURABAYA | 8.696.000 | 4.385.000 |
| 275. | PALEMBANG | BALIKPAPAN | 9.894.000 | 5.220.000 |
| 276. | PALEMBANG | MAKASSAR | 9.466.000 | 4.781.000 |
| 277. | PALEMBANG | PONTIANAK | 6.685.000 | 3.840.000 |
| 278. | PALEMBANG | SEMARANG | 6.236.000 | 3.305.000 |
| 279. | PALEMBANG | SOLO | 6.236.000 | 3.444.000 |
| 280. | PALEMBANG | SURABAYA | 7.690.000 | 3.744.000 |
| 281. | PALEMBANG | TIMIKA | 15.210.000 | 8.076.000 |
| 282. | PALU | MAKASSAR | 4.268.000 | 2.578.000 |
| 283. | PALU | POSO | 1.957.000 | 1.423.000 |
| 284. | PALU | SORONG | 6.878.000 | 3.883.000 |
| 285. | PALU | SURABAYA | 6.878.000 | 3.883.000 |
| 286. | PALU | TOLI-TOLI | 2.941.000 | 1.915.000 |
| 287. | PANGKAL PINANG | BALIKPAPAN | 9.038.000 | 4.631.000 |
| 288. | PANGKAL PINANG | BANJARMASIN | 7.091.000 | 3.915.000 |
| 289. | PANGKAL PINANG | BATAM | 6.739.000 | 3.818.000 |
| 290. | PANGKAL PINANG | YOGYAKARTA | 6.065.000 | 3.262.000 |
| 291. | PANGKAL PINANG | MAKASSAR | 9.060.000 | 4.663.000 |
| 292. | PANGKAL PINANG | MANADO | 12.097.000 | 5.808.000 |
| 293. | PANGKAL PINANG | MEDAN | 8.888.000 | 4.653.000 |
| 294. | PANGKAL PINANG | PADANG | 7.337.000 | 3.883.000 |
| 295. | PANGKAL PINANG | PALEMBANG | 5.829.000 | 3.262.000 |
| 296. | PANG KAL PINANG | PEKANBARU | 7.391.000 | 3.936.000 |
| 297. | PANGKAL PINANG | PONTIANAK | 6.279.000 | 3.733.000 |
| 298. | PANGKAL PINANG | SEMARANG | 5.829.000 | 3.187.000 |
| 299. | PANGKAL PINANG | SOLO | 5.829.000 | 3.326.000 |
| 300. | PANGKAL PINANG | SURABAYA | 7.284.000 | 3.626.000 |
| 301. | PEKANBARU | PONTIANAK | 8.247.000 | 4.514.000 |
| 302. | PEKANBARU | SEMARANG | 7.797.000 | 3.979.000 |
| 303. | PEKANBARU | SOLO | 7.797.000 | 4.118.000 |
| 304. | PEKANBARU | SURABAYA | 9.241.000 | 4.407.000 |
| 305. | PEKANBARU | TIMIKA | 16.771.000 | 8.739.000 |
| 306. | PONTIANAK | MAKASSAR | 9.915.000 | 5.241.000 |
| 307. | PONTIANAK | SEMARANG | 6.685.000 | 3.765.000 |
| 308. | PONTIANAK | SOLO | 6.685.000 | 3.904.000 |
| 309. | PONTIANAK | SURABAYA | 8.140.000 | 4.204.000 |
| 310. | PONTIANAK | TIMIKA | 15.659.000 | 8.535.000 |
| 311. | SEMARANG | MAKASSAR | 9.466.000 | 4.706.000 |
| 312. | SOLO | MAKASSAR | 9.466.000 | 4.845.000 |
| 313. | SURABAYA | DENPASAR | 3.198.000 | 1.979.000 |
| 314. | SURABAYA | JAYAPURA | 12.675.000 | 7.231.000 |
| 315. | SURABAYA | MAKASSAR | 5.936.000 | 3.433.000 |
| 316. | SURABAYA | TIMIKA | 11.295.000 | 6.589.000 |

Catatan :

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

2.2 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

a. Keberangkatan

- 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan;
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

- 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal; atau
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas

| NO | PROVINSI | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----------|------------------|------------|--------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 1. | ACEH | Orang/Kali | 127.000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | Orang/Kali | 308.000 |
| 3. | RIAU | Orang/Kali | 101.000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | Orang/Kali | 165.000 |
| 5. | JAMBI | Orang/Kali | 147.000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | Orang/Kali | 190.000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | Orang/Kali | 179.000 |
| 8. | LAMPUNG | Orang/Kali | 168.000 |
| 9. | BENGKULU | Orang/Kali | 109.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | Orang/Kali | 97.000 |
| 11. | BANTEN | Orang/Kali | 536.000 |
| 12. | JAWA BARAT | Orang/Kali | 200.000 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA | Orang/Kali | 256.000 |
| 14. | JAWA TENGAH | Orang/Kali | 108.000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | Orang/Kali | 267.000 |
| 16. | JAWA TIMUR | Orang/Kali | 233.000 |

| NO | PROVINSI | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----------|---------------------|------------|--------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 17. | BALI | Orang/Kali | 227.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | Orang/Kali | 231.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/Kali | 116.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | Orang/Kali | 171.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | Orang/Kali | 134.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | Orang/Kali | 180.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | Orang/Kali | 533.000 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA | Orang/Kali | 218.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA | Orang/Kali | 138.000 |
| 26. | GORONTALO | Orang/Kali | 265.000 |
| 27. | SULAWESI BARAT | Orang/Kali | 313.000 |
| 28. | SULAWESI SELATAN | Orang/Kali | 187.000 |
| 29. | SULAWESI TENGAH | Orang/Kali | 165.000 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA | Orang/Kali | 171.000 |
| 31. | MALUKU | Orang/Kali | 288.000 |
| 32. | MALUKU UTARA | Orang/Kali | 215.000 |
| 33. | PAPUA | Orang/Kali | 513.000 |
| 34. | PAPUA BARAT | Orang/Kali | 236.000 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA | Orang/Kali | 236.000 |
| 36. | PAPUA TENGAH | Orang/Kali | 513.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN | Orang/Kali | 513.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN | Orang/Kali | 513.000 |

Catatan :

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bengkulu ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Bengkulu ke Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu;
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Internasional Soekarno Hatta ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Jakarta; dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan di Jakarta ke Bandara Internasional Soekarno Hatta; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu ketempat kedudukan (kantor).

Contoh 2

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bengkulu ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Bengkulu ke Bandara Fatmawati Soekarno; dan
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu ketempat kedudukan (kantor).

2.3 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ketempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi yang sama (One Way)

| NO | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----|------------------|------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bengkulu | Kab. Bengkulu Selatan | Orang/ Kali | 344.000 |
| 2 | Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah | Orang/ Kali | 232.000 |
| 3 | Bengkulu | Kab. Bengkulu Utara | Orang/ Kali | 313.000 |
| 4 | Bengkulu | Kab. Kaur | Orang/ Kali | 385.000 |
| 5 | Bengkulu | Kab. Kepahiang | Orang/ Kali | 298.000 |
| 6 | Bengkulu | Kab. Lebong | Orang/ Kali | 375.000 |
| 7 | Bengkulu | Kab. Mukomuko | Orang/ Kali | 423.000 |
| 8 | Bengkulu | Kab. Rejang Lebong | Orang/ Kali | 313.000 |
| 9 | Bengkulu | Kab. Seluma | Orang/ Kali | 282.000 |

2.4 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ketempat tujuan di kabupaten/kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Satuan Biaya Transportasi Dari Dki Jakarta Ke Kabupaten/ Kota Sekitar (One Way)

| NO | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----|------------------|------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jakarta | Kota Bekasi | Orang/Kali | 284.000 |
| 2 | Jakarta | Kab. Bekasi | Orang/Kali | 284.000 |
| 3 | Jakarta | Kab. Bogor | Orang/Kali | 300.000 |
| 4 | Jakarta | Kota Bogor | Orang/Kali | 300.000 |
| 5 | Jakarta | Kota Depok | Orang/Kali | 275.000 |
| 6 | Jakarta | Kota Tangerang | Orang/Kali | 286.000 |
| 7 | Jakarta | Kota Tangerang Selatan | Orang/Kali | 286.000 |
| 8 | Jakarta | Kab. Tangerang | Orang/Kali | 310.000 |
| 9 | Jakarta | KepulauanSeribu | Orang/Kali | 428.000 |

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN KEGIATAN

Satuan biaya konsumsi rapat/kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan dan kegiatan :

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat dan Kegiatan terinci pada Tabel 2.7

Tabel 2.7

Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Kegiatan

| NO | URAIAN | SATUAN | MAKAN (Rp) | KUDAPAN (SNACK) (Rp) |
|----------|--|------------|------------|----------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> |
| 1 | Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara | Orang/Kali | 110.000 | 49.000 |
| 2 | Rapat Biasa dan Kegiatan | Orang/Kali | 48.000 | 16.000 |

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 1 | Gedung Bertingkat | M ² / Tahun | 191.000 |
| 2 | Gedung Tidak Bertingkat | M ² / Tahun | 131.000 |
| 3 | Halaman Gedung/ Bangunan Kantor | M ² / Tahun | 10.000 |

4.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.9

Tabel 2.9

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----------|---|------------|--------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| I | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat | | |
| 1 | Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD | Unit/Tahun | 45.670.000 |
| 2 | Anggota DPRD | Unit/Tahun | 44.010.000 |
| 3 | Pejabat Eselon I | Unit/Tahun | 42.350.000 |
| 4 | Pejabat Eselon II | Unit/Tahun | 42.340.000 |
| II | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | | |
| 1 | Roda Empat | Unit/Tahun | 36.940.000 |
| 2 | Double Gardan | Unit/Tahun | 39.570.000 |
| 3 | Roda Dua | Unit/Tahun | 5.000.000 |
| III | Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat | | |
| 1 | Roda 6 | Unit/Tahun | 37.110.000 |
| 2 | Speed Boat | Unit/Tahun | 20.240.000 |

4.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal Komputer/*notebook*, printer, AC *split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.10

Tabel 2.10

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 1 | Inventaris Kantor | Pegawai/ Tahun | 80.000 |
| 2 | <i>Personal Computer/ Notebook</i> | Unit/Tahun | 730.000 |
| 3 | <i>Printer</i> | Unit/Tahun | 690.000 |
| 4 | <i>AC Split</i> | Unit/Tahun | 610.000 |
| 5 | <i>Genset</i> lebih Kecil dari 50 KVA | Unit/Tahun | 7.190.000 |
| 6 | <i>Genset</i> 75 KVA | Unit/Tahun | 8.640.000 |
| 7 | <i>Genset</i> 100 KVA | Unit/Tahun | 10.150.000 |
| 8 | <i>Genset</i> 125 KVA | Unit/Tahun | 10.780.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 9 | Genset 150 KVA | Unit/Tahun | 13.260.000 |
| 10 | Genset 175 KVA | Unit/Tahun | 14.810.000 |
| 11 | Genset 200 KVA | Unit/Tahun | 15.850.000 |
| 12 | Genset 250 KVA | Unit/Tahun | 16.790.000 |
| 13 | Genset 275 KVA | Unit/Tahun | 17.760.000 |
| 14 | Genset 300 KVA | Unit/Tahun | 20.960.000 |
| 15 | Genset 350 KVA | Unit/Tahun | 22.960.000 |
| 16 | Genset 450 KVA | Unit/Tahun | 25.620.000 |
| 17 | Genset 500 KVA | Unit/ Tahun | 31.770.000 |

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


ROSEFFENDI, S.H., M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19721012 200212 1 004



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK ATAS USULAN BESARAN
BIAYA DARI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULU



KOP PERANGKAT DAERAH PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Kepala Perangkat Daerah
NIP : NIP Kepala Perangkat Daerah
Pangkat / Gol : Pangkat/ Golongan Kepala Perangkat Daerah
Jabatan : Jabatan Kepala Perangkat Daerah
Selaku Pengguna Anggaran (PA)

1. Menyatakan bahwa usulan besaran biaya yang diusulkan kepada Tim Penyusun Standar Harga Satuan melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Standar Harga Satuan telah mengacu dan mengikuti harga pasar yang berlaku di Provinsi Bengkulu dan telah dihitung dengan metode atau pendekatan perhitungan harga yang akuntabel;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses pengusulan besaran standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Standar Harga Satuan kami bersedia untuk memperbaiki dan mempertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

Bengkulu, Tanggal Tahun

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

N A M A J E L A S

Pangkat/ Golongan
NIP

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt KEPALA BIRU HUKUM,


ROSEFFENDI, S.H., M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19721012 200212 1 004